



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini dibentuk sebagai wujud pertanggungjawaban Biro Hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan dokumen pencapaian kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga/organisasi pemerintahan. Yang pada dasarnya menegaskan tentang pengaktualisasian tingkat pencapaian hasil (*outcome*) dari target perencanaan pembangunan dari instansi pemerintah.

Biro Hukum merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang hukum yang tentunya dalam pola dan kebijakan program harus berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam RPMJD Provinsi, RENSTRA-OPD, RPMJD-OKPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Daftar Penggunaan Anggaran OPD (DPA-OPD) yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan tantangan, baik yang bersumber dari dinamika kebijakan, keterbatasan sumber daya, maupun penyesuaian regulasi. Namun demikian, dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, Biro Hukum senantiasa berupaya menjaga kualitas kinerja dan pelayanan hukum secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya selaku pimpinan tinggi Biro Hukum mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan, laporan ini akan menjadi manfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi tinjauan bagi peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.

Palu, Januari 2026
Kepala Biro Hukum



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740610 200003 1007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Ikhtisar Eksekutif..... iii

BAB I Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum..... 1

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi..... 2

1.3 Isu-Isu Strategis..... 4

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP 2024 5

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) 7

2.2 Struktur Program dan Kegiatan..... 8

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 9

2.4 Perjanjian Kinerja 10

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja..... 15

3.2 Realisasi Anggaran..... 24

3.3 Inovasi 26

3.4 Penghargaan 27

BAB IV Penutup 27

Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif ini menyajikan gambaran ringkas atas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum. Uraian ini merangkum keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Biro Hukum melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang sangat positif, tercermin dari nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebesar **86,42** dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar **87,36**. Capaian ini dirasa cukup menggambarkan kinerja Biro Hukum yang optimal dalam mendukung terciptanya tertib regulasi, peningkatan kualitas produk hukum daerah, serta penguatan aspek reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, total anggaran Biro Hukum pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.793.491.250** dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai **Rp2.533.427.020** atau sebesar **90,69 persen**. Capaian penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, meskipun terdapat penyesuaian anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, khususnya dalam konteks kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran pada tahun berjalan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia fungsional tertentu, seperti analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan, Biro Hukum tetap mampu menjaga stabilitas dan kualitas capaian kinerja melalui penguatan koordinasi, optimalisasi peran aparatur, serta penyesuaian mekanisme kerja.

Selain capaian kinerja utama, Biro Hukum juga melakukan upaya penguatan berkelanjutan melalui perumusan inovasi pelayanan hukum. Pada tahun 2025, Biro Hukum menyusun dan merencanakan pengembangan aplikasi **SIGAP (Sistem Integrasi dan Gerak Aksi Pelayanan Hukum)** yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2026. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keterpaduan pelayanan hukum bagi perangkat daerah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja Biro Hukum pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang signifikan dan konsisten, dengan capaian kinerja yang tinggi serta komitmen berkelanjutan terhadap perbaikan tata kelola dan pelayanan hukum. Hasil ini menjadi dasar yang kuat bagi Biro Hukum untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum Organisasi

Pada subbab ini diuraikan gambaran umum organisasi, seperti jumlah SDM, jumlah sarana prasarana pendukung dan lain-lain. Organisasi ialah unsur penting dalam mendukung pelaksanaan dan pembangunan daerah Biro Hukum sebagai salah satunya memiliki peran yang juga ikut berkontribusi dalam peran profesionalnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yaitu aparatur yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang peran profesional pemerintahan, hal ini secara langsung ikut menentukan efektifitas dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh pemerintah daerah seperti Biro Hukum. Berikut, kami sajikan gambaran umum Biro Hukum sebagai dasar dalam memahami capaian kinerja yang dilaporkan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya adalah unsur utama dalam mendukung pekerjaan dan kinerja suatu organisasi seperti pemerintahan daerah. Di Biro Hukum, jumlah sumber daya manusia (pegawai) sampai dengan bulan desember 2025 adalah sebanyak 77 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1.1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan	
			P	L
1	S3	1		1
2	S2	8	6	2
3	S1	58	28	30
4	D-IV	-		
5	D-III	3	3	
6	SMA/SMK	7		7
Jumlah		77	37	40

1.1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

NO	Jenis Jabatan	Jumlah Orang	Keterangan	
			P	L
1	Kepala Biro Hukum	1	0	1
2	Kabag. Bantuan Hukum	1	0	1
3	Kabag. Peraturan Perundang undangan Provinsi	1	1	0
4	Kabag. Peraturan Perundang-undangan	1	1	0
5	Kasubag Produk Hukum Daerah Wilayah III	1	1	0
6	Kasubag Produk Hukum Daerah Wilayah II	1	0	1
7	Kasubag. Produk Hukum Daerah Wilayah I	1	0	1
8	Kasubag Non Litigasi dan HAM	1	1	0
9	Kasubag. Litigasi	1	0	1
10	Kasubag. Tata Usaha	1	1	0
11	Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum	1	1	0
12	Kasubag Peyusunan Produk Hukum Penetapan	1	0	1
13	Kasubag Penyusunan Produk Hukum	1	1	0
14	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-	37	17	20
15	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	2
16	Pengelola Data dan Informasi	1	1	0
17	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	3
18	Ahli Pertama Penyuluh Hukum	2	0	2
19	Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia	1	0	1
20	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	8	6	2
21	Penata Layanan Operasional	3	2	1
22	Operator Layanan Operasional	5	1	4
Jumlah		77	36	41

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Biro Hukum juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI (BAIK/CUKUP/RUSAK
1	PC	34	BAIK
2	LEPTOP	18	BAIK
3	PRINTER	20	BAIK
4	SCANNER	4	BAIK
5	KENDARAN RODA 2	18	BAIK
6	KENDARAN RODA 4	5	BAIK
Total		99	

1.2Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai bagian dari Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, biro hukum yaitu sebagai unsur pendukung didalamnya juga berkinerja melalui sistem kerja, berdasarkan regulasi, serta berkoordinasi antar unit untuk menunjang pelaksanaan maksimal program dan kegiatan guna mencapai sasaran kinerja yang telah dicapai. Adapun tugas dan fungsi Biro Hukum telah tercantum pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Pergub Nomor 57 Tahun 2022.

Tugas Biro Hukum, yaitu:

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum.

Biro Hukum, memiliki fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah provinsi, produk hukum daerah kabupaten/kota, dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang produk hukum daerah provinsi, produk hukum daerah kabupaten/kota, dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah provinsi, produk hukum daerah kabupaten/kota, dan bantuan hukum.
- d. Pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) provinsi dan kabupaten/kota (sebagai pusat koordinasi JDIH wilayah).
- e. Pelaksanaan fungsi administratif dan dukungan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Biro Hukum terdiri atas unit pelaksana teknis yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni:

- A. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya;
- B. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III;
- C. Bagian Bantuan Hukum membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Litigasi; dan
 - 3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.

Yang kemudian dijabarkan dalam tiga bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggungjawab Biro Hukum dalam penyelenggaraan pembangunan politik hukum di daerah, yakni:

A. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi (BPPP)

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya

B. Bagian Bantuan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

C. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota (BPPKK)

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

1.3 Isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan terhadap faktor pendukung dan penghambat kinerja, berbagai elemen dan unsur lainnya pada layanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah baik internal maupun eksternal, didapati hasil bahwa beberapa isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum yaitu dalam mencapai target realisasi kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, yang kemudian terjabarkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

Isu-isu terkait, antara lain:

1. Penguatan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi dalam mendukung layanan hukum, produk hukum, dan HAM.
2. Pemenuhan aparatur yang membidangi dan berkompetensi dalam pelaksanaan layanan di Biro Hukum.
3. Optimalisasi anggaran yang tersedia secara efektif dan efisiensi

4. Optimalisasi tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Adapun isu-isu strategis diatas, berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Hukum dan juga memengaruhi hasil perolehan nilai indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Pelayanan Publik.

1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ialah penilaian yg bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah salah satunya Biro Hukum. Sebagai salahsatu unit pendukung dalam organisasi yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu untuk memerhatikan hasil evaluasi LHE adalah untuk perbaikan kinerja dan target unit di tahun berikutnya untuk mencapai hasil yang optimal.

Kemudian berikut ini hasil pendampingan dan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 yang dilakukan untuk evaluasi tahun 2024:

- a. Pendampingan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025.
 1. Melakukan Evaluasi kinerja Internal dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan per Triwulan.
 2. Setiap unit kerja/bidang menyusun Laporan Pengukuran Kinerja per triwulan, kemudian di rekapitulasi dalam laporan Monev per triwulan.
 3. Pegawai yang melaksanakan Monev kinerja internal agar diikutkan dalam kegiatan sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 4. Melakukan Evaluasi kinerja internal secara mendalam dengan membuat laporan monev triwulan untuk mengetahui realisasi kinerja, factor yang mendorong dan menghambat serta rekomendasi.
 5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang di input pada Laporan Monitoring dan Evaluasi harus sesuai dengan Perjanjian Kinerja seluruh pegawai yang telah ditetapkan.
 6. Proses Pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan Monitoring Evaluasi agar menggunakan Aplikasi yang terintegrasi.

7. Memastikan rekomendasi perbaikan atas factor hambatan pada Laporan Monitoring Evaluasi telah dilaksanakan (dapat terlihat dengan adanya peningkatan realisasi target pada monev triwulan berikutnya)
 8. Rekomendasi pada LHE AKIP tahun 2024 agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
 9. Melakukan perbaikan atas realisasi kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara menyesuaikan strategi, kebijakan, aktifitas, atau anggaran atas target-target yang tercapai pada tiap triwulan.
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya ditindaklanjuti dan masih ada yang bukti dukung tindak lanjutnya belum sesuai dengan rekomendasi. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 beserta progres atau status pelaksanaan tindaklanjut nya dimuat dalam Berita Acara Tindak Lanjut hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 (terlampir).

Atas hasil pendampingan dan tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Tim menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2025 belum sepenuhnya mengikuti Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2024 belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Disarankan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh hasil pendampingan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 dengan mengikuti Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam melakukan evaluasi internal.
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2024 secara tepat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini, telah diuraikan gambaran secara umum dalam perencanaan kinerja Biro Hukum sebagai bagian dari sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Adapun perencanaan didalamnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ebrlaku, dan disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan terkhususnya RPJMD dan Renstra.

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

Subbab ini memuat ulasan mengenai arah tujuan, sasaran dan indiaktor Biro Hukum yang disusun dan telah ditetapkan berdasarkan Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Table4.1) Renstra Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham	Mendorong tercapainya pembangunan dibidang hukum melalui penyusunan produk hukum, pegaturan dan pendokumentasian, fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, penanganan masalah hukum litigasi dan non litigasi hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97
			Persentase produk hukum daerah provinsi yang dihasilkan setiap tahun dan terdokumentasikan	Persen	75	80	85	90	100
			Persentase produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi Gubernur setiap tahun	Persen	75	80	85	90	100
			Persentase pencapaian penanganan masalah kasus/perkara hukum/ litigasi dilingkungan pemerintah daerah	Persen	75	80	85	90	100
			Persentase pencapaian Nilai/skor rencana aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun	Persen	75	80	85	90	100
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Penataan kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	76,61	85	88,50	90	92

Tabel 2.2 (Table3.3) Renstra Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Regulasi dan Kebijakan	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Regulasi dan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88	
			Indeks Kualitas Kebijakan	55	58	60	62	65	67	50 (2023) Capaian dihitung setiap 2 tahun

Berdasarkan table di atas, subbab ini dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Biro Hukum yang tertuang dalam Renstra periode

2022-2026 dan Renstra 2025-2029. Perumusan ini dimaksudkan untuk memastikan arah penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di bidang hukum berjalan secara terukur dan berkelanjutan, melalui penyusunan produk hukum yang berkualitas, tertib dokumentasi, pelayanan hukum litigasi dan non litigasi serta fasilitasi dan evaluasi pada pemerintah wilayah kabupaten/kota. Kemudian dalam beberapa tahun target ditetapkan meningkat secara bertahap, hal ini adalah cerminan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat yang hendak diupayakan, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntable dan transparant.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Subbab ini menguraikan nomenklatur dan anggaran DPA Perubahan Tahun 2025 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang
1	2	3	4	5
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.586.755.700	1.365.383.450	- 221.372.250
	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	894.998.700	715.770.450	- 179.228.250
	Fasilitas Bantuan Hukum	691.757.000	649.613.000	- 42.144.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.563.244.300	1.428.107.800	- 135.136.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Emluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.610.000	13.260.000	- 5.350.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah	472.590.000	461.505.000	- 11.085.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.365.811	241.618.511	84.252.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.233.589	465.444.289	17.210.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pennjang Urusan Pemerintah Daerah	90.096.800	-	- 90.096.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.578.100	-	- 119.578.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.770.000	246.280.000	- 10.490.000

Berdasarkan uraian, Biro Hukum sebagai penyelenggara pemerintahan melaksanakan Prograjm Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan ptioritas dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Fasilitasi bantuan Hukum yang diarahkan untuk menjaga kualitas produk hukum daerah serta mendukung penanganan permasalahan hukum di lingkungan Pemerintahan Daerah. Kemudian, Program Urusan Pemerintahan Daerah Mencakup Kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tertera, dengan seluruh kegiatan tersebut berfungsi sebagai penopang kelancaran tugas dan fungsi Biro Hukum secara efektif dan akuntable.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pada DPA perubahan Tahun anggaran 2025 yang beriringan dengan kebijakan efisiensi, alokasi anggaran Biro Hukum telah mengalami penyesuaian berupa pengurangan. Penyesuaian ini dilakukan dengan tidak mengurangi susbtansi program dan kegiatan, dengan mengedepankan nilai efisiensi, ptomalisasi sumber daya serta pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski telah terjadi pengurangan anggaran, pelaksanaannya tetap diarahkan pada hasil capaian yang optimal dan berorientasi kinerja.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Subbab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). IKU disusun untuk memastikan keterukuran kinerja serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara efektif dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan IKU Biro Hukum Tahun 2021-2026 dan IKU tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.4 IKU Biro Hukum Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	62	64	66	68	70,05
		Meningkatnya Pembangunan di Bidang Hukum	Rata-Rata Capaian Target Pembangunan Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	75	80	85	90	100
		Meningkatnya Capaian RANHAM Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai/Skor Rencana Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	75	80	85	90	100

Tabel 2.5 IKU Biro Hukum Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	55	58	60	62	65	67
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	89	90	91	92	93

Indikator Kinerja Utama menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja tahunan. Tabel di atas menyajikan target Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ialah komitmen kerja aparatur pemerintahan dalam unit kerja yang mempresentasikan komitmen kerja agar dalam pelaksanaannya dapat terindikasi secara jelas dan terukur. Leveling perjanjian kerja yang tertuang di dalamnya ialah program, kegiatan hingga sub kegiatan dengan indikator sebagai acuan pengukuran pekerjaan sebagai bagian dari dokumen perencanaan. Adapun Biro Hukum memiliki 2 Program Utama, yaitu: 1). Program Fasilitasi dan Bantuan Hukum dan 2) Program Perundang-undangan

Berikut kami sajikan Perjanjian Kinerja Biro Hukum tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIMAN, SH.,M.Si

Jabatan : Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. NOVALINA, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Selaku

atasan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, PIHAK

PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan Target Kinerja dengan melakukan Percepatan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (eMEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Palu,

2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 200003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	88
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	55

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN APBD DAERAH PROVINSI	Rp 1.563.244.300	
2. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM RP	1.586.755.700	APBD
JUMLAH TOTAL <u>ANGGARAN</u>	3.150.000.000	

Palu, 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 200003 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIMAN, SH.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 200003 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	88 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	55 Indeks

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.089.940.600,	APBD
2 Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.001.670.750	APBD
	Rp. 2.071.611.350	

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 1690927 198811 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ADIMAN, SH/MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740810 200003 1 007

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, diharapkan Biro Hukum sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang jelas dan konkret dalam mencapai target kinerja yang sebelumnya telah disepakati. Kemudian ini juga dipergunakan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagai acuan dalam pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja tahun yang berjalan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja ialah unsur pertanggungjawaban instansi yang dibentuk dalam wujud pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target tujuan dan sasaran, pengelolaan dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada unit atau instansi dalam bentuk target kemudian direalisasikan dan ditetapkan melalui media laporan pertanggungjawaban yaitu laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam hal ini, akuntabilitas yang diartikan sebagai tanggungjawab wajib untuk menginformasikan jelas dan nyata kinerja dari institusi masing-masing kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas ini tersistem pada suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Biro Hukum ialah salah satu unit dalam organisasi perangkat daerah yang ikut melaksanakan dan menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum yang kemudian menjawab visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah lewat program kegiatan serta kinerja yang dapat diukur pencapaiannya melalui pelaporan akuntabilitas kinerjanya sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan Biro Hukum dalam mencapai target-target strategis yang ditetapkan pada Renstra Setda 2022-2026.

3.1 Capaian Kinerja

Subbab ini menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran berjalan. Biro Hukum pada tahun 2025 melakukan analisis dengan membandingkan target dan realisasi kinerja, baik secara tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang juga dilengkapi dengan analisis penyebab dan upaya tindak lanjut yang dilakukan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Bagian ini akan menyajikan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang dimaksudkan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi indikator yang telah memenuhi atau belum memenuhi target. Diharapkan data ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi guna peningkatan dalam proses pelaksanaan tugas serta fungsi Biro Hukum yang lebih baik kedepannya.

Berikut kami sajikan table perbandingan antara target dan realisasi kinerja Biro Hukum tahun 2025, yang disusun berdasarkan keadaan real mengenai pencapaian kinerja dan perbandingannya dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya:

Tabel 3.1 Table Perbandingan Antara realisasi target dan Realisasi kinerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	87,22	97
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	62	87,36	141
		Indeks Kualitas Kebijakan	55	86,42	157

Permasalahan pembangunan daerah di bidang hukum muncul karena adanya kesenjangan (gap) antara kinerja Biro Hukum yang telah dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan, serta adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan di masa mendatang dengan kondisi nyata yang ada sekarang.

Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditargetkan sebesar 55 berhasil direalisasikan sebesar 86,42. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dalam mendukung tertib administrasi hukum serta pelayanan di bidang pembentukan produk hukum dan pembimbingan hukum telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang ditetapkan dengan target sebesar 70 juga menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, dengan realisasi mencapai 87,36. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola hukum daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan hukum, serta meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip reformasi birokrasi di bidang hukum.

Secara keseluruhan, capaian IKK dan IRH yang melebihi target tersebut mengindikasikan bahwa strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum telah tepat sasaran dan selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan komitmen Biro Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada perangkat daerah dan masyarakat, meskipun dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam menilai keberhasilan Biro Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat hukum, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Bagian ini menguraikan perkembangan kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja Tahun berjalan dengan kinerja pada Tahun sebelumnya serta beberapa Tahun terakhir. Analisis ini bertujuan untuk melihat tren peningkatan atau penurunan kinerja dari waktu ke waktu.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun

No	gram / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,00		0,00	78,00		0,00	80,00		0,00	88,50	85,56	0,97	90	87,22	97%
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	-	-	-	-	-	-	50	95	1,9	60	87,9	1,465	62	87,36	141%
3		Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai							86	50	58%	89	-	-	55	86,42	157%

Dari perbandingan realisasi diatas, dapat ditarik pernyataan bahwa realisasi dan capaian kinerja selama tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir menunjukan hasil yang relatif stabil, meski demikian tidak semua indikator mengalami capaian sesuai target. Akan tetapi, capaian kinerja tetap berada dalam radar aman dan batas yang wajar sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kondisi ini mencerminkan komitmen biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta kemampuan yang konsisten dalam menjaga amanat dan kualitas kinerja ditengah dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, secara garis besar kinerja Biro Hukum dinilai signifikan dalam mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran pembangunan di biadng hukum.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Bagian ini menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja kumulatif sampai dengan Tahun berjalan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis daerah, seperti RPJMD atau RENSTRA. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Tabel 3.4
Membandingkan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan	87,22	88
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	87,36	70
3		Indeks Kualitas kebijakan	86,42	55

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar nasional atau Daerah Lain

Bagian ini menguraikan perbandingan realisasi kinerja Tahun berjalan dengan standar nasional atau capaian kinerja daerah lain yang sejenis. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja daerah dalam konteks regional maupun nasional.

Pada bagian ini, aspek perbandingan yang dimaksudkan belum tersedia secara spesifik untuk dijadikan pembanding langsung pada indikator kinerja Biro Hukum. Kemudian juga, ketersediaan data yang bersifat komparatif antar daerah juga masih terbatas. Meski demikian, capaian kinerja Biro Hukum tetap dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, evaluasi tersebut memberikan hasil yang baik dan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas tata Kelola hukum daerah.

Kedepannya, Biro Hukum berencana untuk tetap mendorong sistem pengukuran kinerja, termasuk melalui pengembangan indikator yang lebih terstandarisasi, guna mendukung evaluasi kinerja yang lebih komprehensif dan berorientasi pada praktik terbaik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Bagian ini memuat analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan, termasuk terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja. Selain itu, disajikan pula alternatif solusi dan langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja. Pada tahun berjalan, capaian kinerja Biro Hukum secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

1. Indikator Reformasi Hukum (IRH)

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan pada indikator ini ialah untuk memastikan seluruh peraturan yang ada di Sulawesi Tengah tertib, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

I. Faktor Keberhasilan

- a) Seluruh rancangan produk hukum telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Evaluasi terhadap Perda Kabupaten/Kota terlaksana sesuai ketentuan.
- c) Dokumentasi dan publikasi produk hukum melalui JDIH berjalan tertib.

II. Faktor Kegagalan/Tantangan

- a) Keterbatasan SDM analis hukum dalam melakukan evaluasi regulasi menyeluruh
Ketersediaan dan kapasitas Analis Hukum belum sepenuhnya memadai untuk melakukan penelaahan dan evaluasi seluruh regulasi secara komprehensif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya percepatan dan kedalaman analisis terhadap peraturan yang perlu ditinjau atau disesuaikan.

- b) Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti rapat harmonisasi, konsultasi ke kementerian, maupun peningkatan kapasitas SDM. Kondisi ini menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi capaian kinerja

Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi SDM dengan ketersediaan yang ada melalui penetapan skala prioritas terhadap regulasi yang bersifat strategis, penguatan koordinasi internal, serta penataan beban kerja yang lebih efektif dan proporsional. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan mekanisme kerja yang lebih efisien dapat dilakukan untuk menjaga kualitas

evaluasi dan harmonisasi regulasi, sehingga pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi terbatas.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Analisi Keberhasilan dan Kegagalan pada indikator ini ialah melihat isi kebijakannya, rumusan dan penyusunan guna mendukung pencapaian kualitas kebijakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

I. Faktor Keberhasilan

- a) Terdapat pelibatan OPD teknis dalam pembahasan rancangan regulasi.
- b) Target penyelesaian fasilitasi rancangan produk hukum tercapai sesuai waktu yang ditetapkan.
- c) Indikator kebijakan telah dirumuskan secara terukur dalam dokumen perencanaan.

II. Faktor Kegagalan/Tantangan

- a) Belum optimalnya ketersediaan SDM Analis Hukum yang memadai.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, khususnya Analis Hukum, berdampak pada tingginya beban kerja serta belum optimalnya percepatan penyelesaian fasilitasi dan evaluasi produk hukum dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

- b) Perubahan regulasi pusat yang dinamis memerlukan penyesuaian berulang terhadap rancangan kebijakan.

Perubahan regulasi pusat yang dinamis memerlukan penyesuaian berulang terhadap rancangan kebijakan daerah, karena setiap pembaruan peraturan di tingkat nasional harus segera disinkronkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian norma maupun tumpang tindih pengaturan. Kondisi ini berdampak pada perlunya revisi substansi, penyesuaian redaksional, serta harmonisasi ulang sebelum kebijakan dapat ditetapkan

Terhadap hambatan yang dihadapi, Biro Hukum perlu terus meningkatkan penguatan dengan kordinasi dan komunikasi yang baik dengan kementerian atau Lembaga yang terkait dalam proses harmonisasi. Serta menguatkan kapasitas SDM baik menambahkan jumlah, ataupun penataan formasi lainnya untuk pekerjaan yang lebih proporsional.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum antara lain :

- Kurangnya partisipasi stakeholder terhadap pengisian Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasil kuisisioner kurang objektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum adalah:

- Penyederhanaan mekanisme pengisian Survey
- Penguatan komunikasi yang lebih interaktif dengan stakeholder dalam memberikan informasi maupun imbauan secara langsung terhadap pengisian kuesioner survey.

f. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Bagian ini menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya anggaran, dalam mendukung pencapaian kinerja. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara output atau capaian kinerja dengan besaran sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5-8)
				Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	87,22	97%	1.563.244.300	1.341.955.641	0,86	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100	100	100%	18.610.000	11.330.000	0,6088125	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%	18.610.000	11.330.000	0,6088125	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	472.590.000	448.789.500	0,95	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100%	472.590.000	448.789.500	0,95	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	157.365.811	224.385.161	1,43	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%	41.618.511	40.876.761	0,98	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	105	425	405%	102.947.300	183.508.400	1,78	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	100%	12.800.000	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	448.233.589	419.507.867	0,94	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100%	97.179.539	58.075.798	0,60	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100%	44.544.050	34.758.000	0,78	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	100%	306.510.000	326.674.069	1,07	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%	90.096.800	-	0	Efisiensi
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100%	90.096.800	-	0	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%	119.578.100	-	0,00	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	119.578.100	-	0,00	Efisiensi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%	256.770.000	237.943.113	0,93	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	25	104%	232.680.000	226.993.113	0,98	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100%	24.090.000	10.950.000	0,45	
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	62	87,36	141%	1.586.755.700	1.191.471.448	0,75	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persen	100	100	100%	894.998.700	676.259.446	0,76	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kepgub/ Raperda/ Pergub	306	603	197%	420.614.200	395.613.626	0,94	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	5	5	100%	160.384.500	79.985.820	0,50	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda/ Perkada	215	336	15628%	314.000.000	200.660.000	0,64	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	100%	691.757.000	515.212.002	0,74	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	kasus/ perkara	26	14	54%	495.952.000	360.596.600	0,73	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus/ perkara	10	37	370%	195.805.000	154.615.402	0,79	

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Bagian ini menguraikan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja, serta mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum memberikan hasil optimal. Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada Tahun berikutnya.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan		Sasaran Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	1.563.244.300	87,22	1.341.955.641	0,97	0,86
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100	18.610.000	100	11.330.000	1,00	60,88
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	18.610.000	1	11.330.000	1,00	60,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	472.590.000	100	448.789.500	1,00	94,96
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	472.590.000	1	448.789.500	1,00	94,96
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	157.365.811	100	224.385.161	1,00	142,59
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	41.618.511	1	40.876.761	1,00	98,22
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	105	102.947.300	425	183.508.400	4,05	178,25
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	12.800.000	1	-	1,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	448.233.589	100	419.507.867	1,00	93,59
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	97.179.539	2	58.075.798	1,00	59,76
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44.544.050	2	34.758.000	1,00	78,03
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	306.510.000	3	326.674.069	1,00	106,58
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	90.096.800	100	-	1,00	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	90.096.800	1	-	1,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	119.578.100	100	-	1,00	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	119.578.100	1	-	1,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	256.770.000	100	237.943.113	1,00	92,67
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	232.680.000	25	226.993.113	1,04	97,56
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	24.090.000	25	10.950.000	1,00	45,45
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	62	1.586.755.700	87,36	1.191.471.448	1,41	75,09
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persen	100	894.998.700	100	676.259.446	1	0,76
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kepgub/ Raperda/ Pergub	306	420.614.200	603	395.613.626	1,97	0,94
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	5	160.384.500	5	79.985.820	1	0,50
		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda/ Perkada	215	314.000.000	336	200.660.000	1,56	0,64
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	691.757.000	100	515.212.002	1	0,74
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	kasus/ perkara	26	495.952.000	14	360.596.600	0,538462	0,73
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus/ perkara	10	195.805.000	37	154.615.402	3,7	0,79
		TOTAL				3.150.000.000		2.533.427.089		

3.2 Realisasi Anggaran

Subbab ini menyajikan gambaran mengenai realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun anggaran berjalan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uraian mencakup perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran, serta tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Biro Hukum 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi Pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s.d RKPD Provinsi Tahun		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025 sd. TW. III		Keterangan		
			Tahun 2025		Provinsi s.d RKPD Provinsi Tahun		APBD Provinsi Tahun 2025		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		Kendala	Tindak Lanjut	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12										
3	4	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp	K(%)	Rp	K(%)	Rp	K(%)	Rp				
		Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai	90	1.563.234.300	88,50	2.518.498.509	90	1.563.244.300	11,29	176.449.500	18,78	293.620.640	14	215.820.321	42	656.065.111	85,84	1.341.955.572	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100%	18.600.000	100	18.610.000	100	18.610.000	0,00	-	35,20	6.550.000	-	-	26	4.780.000	60,88	11.330.000	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	18.600.000	7	14.605.000	5	18.610.000	0,00		35,20	6.550.000	-	-	26	4.780.000	60,88	11.330.000	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	472.590.000	100	584.796.000	100	472.590.000	29,93	141.454.500	20,26	95.751.000	22	103.964.000	23	107.620.000	94,96	448.789.500	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	472.590.000	4	584.796.000	1%	472.590.000	29,93	141.454.500	20,26	95.751.000	22	103.964.000	23	107.620.000	94,96	448.789.500	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	157.365.811	100	364.953.850	100	157.365.811	0,00	-	0,00	-	26	40.876.761	117	183.508.400	142,59	224.385.161	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	41.618.511	1	29.200.000	1	41.618.511	0,00		0,00		98	40.876.761	-	-	98,22	40.876.761	
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	105	102.947.300	425	288.388.750	105	102.947.300					-		178	183.508.400		183.508.400	
		Sub Kegiatan : Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	12.800.000	4	47.365.100	1	12.800.000	0,00		0,00		-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	448.233.589	100	1.151.420.450	100	448.233.589	0,00	-	28,31	126.912.566	7	31.303.000	58	261.292.232	93,59	419.507.798	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	97.179.539	4	338.147.450	5	97.179.539	0,00		43,95	42.712.966	2	2.100.000	14	13.262.763	59,76	58.075.729	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44.544.050	2	51.999.500	2	44.544.050	0,00		37,94	16.899.800	16	7.238.000	24	10.620.200	78,03	34.758.000	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	306.510.000	3	761.273.500	3	306.510.000	0,00		21,96	67.299.800	7	21.965.000	77	237.409.269	106,58	326.674.069	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	90.096.800	100	23.320.000	100	90.096.800		-		-	-	-	-	-		-	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebekeur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	90.096.800	1	23.320.000	1	90.096.800					-	-	-	-		-	Pemenuhan efisiensi
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	119.578.100	100	256.405.000	100	119.578.100		-		-	-	-	-	-		-	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	119.578.100	4	256.405.000	5	119.578.100					-	-	-	-		-	Pemenuhan efisiensi
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	256.770.000	100	118.993.209	100	256.770.000	13,63	34.995.000	25,08	64.407.074	15	39.676.560	39	98.864.479	92,67	237.943.113	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	232.680.000	25	87.508.209	25	232.680.000	15,04	34.995.000	27,68	64.407.074	14	32.376.560	41	95.214.479	97,56	226.993.113	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	24.090.000	25	31.485.000	15	24.090.000	0,00		0,00		30	7.300.000	15	3.650.000	45,45	10.950.000	
		Program : PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	INDEKS REFORMASI HUKUM	Nilai	62	1.586.755.700	60	2.374.806.922	68	1.586.755.700		66.550.000		186.700.742	8	126.415.300	51	811.805.406		1.191.471.448	
		:	INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	Nilai			-		60							#DIV/0!				-	
		Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	Laporan	100%	894.998.700	4	1.326.934.800	4	894.998.700	6,60	59.050.000	6,23	55.799.500	13	119.785.300	49	441.624.646	75,56	676.259.446	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kepgub/ Raperda/ Pergub	306	420.614.200	516	607.142.100	306	420.614.200	5,49	23.100.000	8,62	36.241.400	16	68.100.300	64	268.171.926	94,06	395.613.626	
		Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	5	160.384.500	5	204.903.500	5	160.384.500	15,59	25.000.000	9,15	14.683.100	-	-	25	40.302.720	49,87	79.985.820	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda/ Perkada	215	314.000.000	573	514.889.200	215	314.000.000	3,49	10.950.000	1,55	4.875.000	16	51.685.000	42	133.150.000	63,90	200.660.000	
		Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan	100	691.757.000	4	1.047.872.122	4	691.757.000	1,08	7.500.000	18,92	130.901.242	1	6.630.000	54	370.180.760	74,48	515.212.002	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	kasus/ perkara	26	495.952.000	56	678.522.875	26	495.952.000	0,00		16,84	83.500.000	-	-	56	277.096.600	72,71	360.596.600	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus/ perkara	10	195.805.000	21	369.349.247	10	195.805.000	3,83	7.500.000	24,21	47.401.242	3	6.630.000	48	93.084.160	78,96	154.615.402	

3.3 Inovasi

Subbab ini memuat uraian mengenai inovasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di bidang hukum. Inovasi dimaksud merupakan upaya pembaruan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025, Biro Hukum merumuskan inovasi pelayanan di bidang hukum berupa aplikasi **SIGAP (Sistem Informasi Layanan Hukum Terpadu)**. Inovasi ini dirancang sebagai platform pelayanan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh jenis layanan pada Biro Hukum; Bantuan Hukum yaitu Litigasi maupun Non-Litigasi dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan yaitu pengaturan, Penetapan, Pendokumentasian serta Fasilitasi produk Hukum Kabupaten/Kota guna mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan hukum. Pengembangan aplikasi SIGAP pada tahun 2025 difokuskan pada tahap perencanaan dan perancangan sistem, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta arah kebijakan transformasi digital pemerintah daerah. Implementasi aplikasi ini direncanakan pada tahun 2026 dan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan responsif dalam mendukung pencapaian kinerja Biro Hukum.

3.4 Penghargaan

Subbab ini memuat informasi mengenai penghargaan yang diterima oleh Biro Hukum sebagai bentuk pengakuan atas kinerja, inovasi, dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum. Berikut penghargaan yang diterima oleh Biro Hukum sebagai unit pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, antara lain:

a. Penghargaan atas Capaian Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)



b. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 (Predikat A)



Penghargaan yang diterima menjadi indikator pengakuan eksternal atas kinerja Biro Hukum serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola hukum daerah.

BAB IV PENUTUP

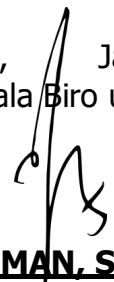
Dokumen ini adalah Laporan Kinerja Biro Hukum Provinsi Sulawesi tengah tahun 2025, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun dengan maksud pertanggungjawaban instansi yang berlaku atas pelaksanaan tugas serta fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum.

Secara umum, hasil pengukuran kinerja utama telah mencapai hasil yang baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan aparatur Biro Hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah dan berkelanjutan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan efisiensi anggaran, serta dinamika perubahan regulasi akibat pergantian pimpinan daerah, Biro Hukum tetap mampu menjaga stabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di bidang hukum.

Selain itu, Biro Hukum pada tahun 2025 telah memperoleh beberapa pengakuan eksternal berupa penghargaan yang diterima. Hal ini tentu cukup memengaruhi factor dan upaya peningkatan indikator dalam tata kelola, inovasi pelayanan, serta komitmen terhadap akuntabilitas kinerja pada arah yang positif.

Ke depan, Biro Hukum akan terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, diharapkan kinerja Biro Hukum dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang tertib hukum, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Palu, Januari 2026
Kepala Biro ukum



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740610 200003 1007